



# **BUPATI GAYO LUES**

## **PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI GAYO LUES**  
**NOMOR 1 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG**  
**SETIAP KAMPUNG KABUPATEN GAYO LUES**  
**TAHUN ANGGARAN 2016**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG**  
**ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI GAYO LUES,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati Kabupaten Gayo Lues menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Gayo Lues tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Gayo Lues (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88);
6. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
10. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012 Nomor 48);
11. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2015 Nomor 77);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI GAYO LUES TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN GAYO LUES TAHUN ANGGARAN 2016.**

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues;
2. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues;
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues;
4. Kampung adalah kampung dan kampung adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gayo Lues dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
6. Pemerintah Kampung adalah Pengulu atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;
7. Jumlah Kampung adalah jumlah kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBKp, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.

## **BAB II**

### **PENDANAAN, PERHITUNGAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **PENDANAAN**

##### **Pasal 2**

Peraturan Bupati Gayo Lues ini menetapkan Rincian Dana Kampung untuk setiap Kampung di Kabupaten Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Gayo Lues ini;

##### **Pasal 3**

Rincian Dana Kampung untuk setiap Kampung di Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasi secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi dasar; dan
- b. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

##### **Pasal 4**

Alokasi dasar per kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden tentang Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

## Pasal 5

Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistic.

### Bagian Kedua

## PERHITUNGAN

### Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DD \text{ Kab/Kota} - AD \text{ Kabupaten/Kota})$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten/Kota

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk Desa Nasional

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin Desa Nasional

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Nasional

Z4 = rasio IKG Kabupaten/Kota terhadap total IKG Kabupaten/Kota yang memiliki Desa

DD kab/kota = pagu Dana desa Kabupaten/Kota

AD kab/kota = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten/kota.

### Pasal 7

Indeks kesulitan goeografis Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistic.

### Bagian Ketiga

## PENYALURAN

### Pasal 8

(1) Penyaluran Dana Kampung dilakukan melalui pemindahanbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Kampung.

- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Kampung dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Kampung diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Kampung dilakukan secara bertahap :
  - a. Tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
  - b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus);
  - c. Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus);
- (4) Penyaluran Dana Kampung Tahap I dilakukan setelah Pengulu menyampaikan:
  - a. Qanun Kampung mengenai APB Kampung kepada Bupati.
  - b. Laporan realisasi pengguna Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya.
  - c. Pengulu menyampaikan Qanun Kampung dan Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a dan huruf b kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Maret.
- (5) Penyaluran Dana Kampung Tahap II dilakukan setelah Pengulu menyampaikan:
  - a. Laporan realisasi penggunaan Dana Kampung tahap I kepada Bupati.
  - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Kampung tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Kampung tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh perseratus).
  - c. Pengulu menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Kampung tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (6) Penyaluran Dana Kampung Tahap III dilakukan setelah Pengulu menyampaikan:
  - a. Penyaluran Dana Kampung tahap III dilakukan setelah Pengulu menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Kampung tahap I dan tahap II kepada Bupati.
  - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Kampung tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Kampung tahap I dan tahap II telah digunakan sebesar 50% (lima puluh perseratus).
  - c. Pengulu menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Kampung tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan September.
- (7) Rician Dana Kampung yang diterima Kampung setiap tahun dianggarkan dalam APB Kampung.

**Bagian Keempat****PENGGUNAAN****Pasal 9**

Dana Kampung diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi :

- (1) Pemenuhan Kebutuhan Dasar.
  - a. Pengembangan pos kesehatan dan polindes;
  - b. Pengelolaan dan pembinaan posyandu; dan
  - c. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.
- (2) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kampung.
  - a. Pembangunan dan pemeliharaan jalan kampung;
  - b. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
  - c. Pembangunan dan pemeliharaan embung kampung;
  - d. Pembangunan energi baru dan terbarukan;
  - e. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
  - f. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala kampung;
  - g. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
  - h. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
  - i. Pengembangan sarana dan prasarana produksi di kampung.
- (3) Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal.
  - a. Pendirian dan pengembangan BUM Kampung;
  - b. Pembangunan dan pengelolaan pasar kampung dan kios kampung;
  - c. Pembangunan dan pengelolaan lumbung kampung;
  - d. Pembutan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
  - e. Pengembangan benih lokal;
  - f. Pengembangan ternak secara kolektif;
  - g. Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
  - h. Pengelolaan padang gembala;
  - i. Pengembangan kampung wisata;
  - j. Pengembangan teknologi tepat guna pengelolaan hasil pertanian dan perikanan.
- (4) Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Secara Berkelanjutan.
  - a. Komoditas tambang mineral bukan logam;
  - b. Komoditas tambang batuan;
  - c. Hutan milik kampung;
  - d. Pengelolaan sampah.

7  
(5) Pemberdayaan Masyarakat Kampung, diantaranya dapat mencakup :

- a. Peningkatan kualitas proses perencanaan kampung;
- b. Mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Kampung maupun oleh kelompok usaha masyarakat kampung lainnya;
- c. Pembentukan dan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat kampung;
- d. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat kampung;
- e. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- f. Dukungan terhadap kegiatan kampung dan masyarakat pengelolaan hutan kampung dan hutan kemasyarakatan;
- g. Dukungan terhadap kegiatan kampung dan masyarakat dalam Sosial Keagamaan; dan
- h. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui :
  - 1 Kelompok usaha ekonomi produktif;
  - 2 Kelompok perempuan;
  - 3 Kelompok tani;
  - 4 Kelompok masyarakat miskin;
  - 5 Kelompok pengrajin;
  - 6 Kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - 7 Kelompok pemuda; dan
  - 8 Kelompok lain sesuai kondisi kampung.

### **Pasal 10**

Pengelolaan Keuangan Kampung dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

## **BAB III**

### **PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **PERTANGGUNGJAWABAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APB Kampung harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Kampung atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

- (3) Pengeluaran Kas Kampung yang mengakibatkan beban APB Kampung tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Qanun kampung tentang APB Kampung ditetapkan menjadi Qanun Kampung.
- (4) Bendahara Kampung sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kedua**

### **PELAPORAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Pengulu dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Kampung Tahap I, Tahap II, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Kampung Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
  - b. Tahap II paling lambat minggu keempat bulan September tahun anggaran berjalan;
  - c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Kampung Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

#### **Pasal 13**

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Kampung dalam hal Pengulu tidak menyampaikan APB Kampung dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APB Kampung dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran Dana Kampung dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Kampung yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Kampung yang melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari Dana Kampung yang diterima Kampung.
- (5) Penggunaan Dana Kampung yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (6) Pengurangan Dana Kampung dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

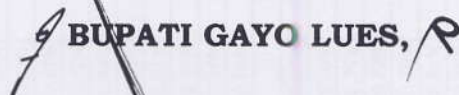



**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita  
Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren  
Pada tanggal, 4 Januari 2016 M  
23 Rabiul Awal 1437 H

  
**BUPATI GAYO LUES,**  
  
**H. IBNU HASIM**

Diundangkan di Blangkejeren  
Pada tanggal, 5 Januari 2016 M  
24 Rabiul Awal 1437 H

  
**SEKRETARIS DAERAH,**  
  
**H. THALIB**

*BERITA DAERAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2016 NOMOR .....234*

**TENTANG**  
**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG**  
**SETIAP KAMPUNG KABUPATEN GAYO LUES**  
**TAHUN ANGGARAN 2016**

Nomor	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG					
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
Urut	Per Kec	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) + (9) + (12) + (15)	(17)
<b>I</b>		<b>Kec. Blangkejeren</b>															
1	1	KOTA BLANG KEJERAN	565,640,000	4413	4.26%	1.06%	8	0.000	0.01%	2.00	0.04%	0.00%	15.68	0.25%	0.07%	1.16%	64,116,418
2	2	PENAMPAAN	565,640,000	1667	1.61%	0.40%	165	0.009	0.30%	3.12	0.06%	0.01%	38.30	0.61%	0.18%	0.89%	49,457,634
3	3	BUKIT	565,640,000	1103	1.06%	0.27%	121	0.006	0.22%	2.52	0.05%	0.00%	27.32	0.44%	0.13%	0.62%	34,494,603
4	4	BACANG	565,640,000	436	0.42%	0.11%	78	0.004	0.14%	28.34	0.54%	0.05%	35.35	0.56%	0.17%	0.47%	26,065,443
5	5	DURIN	565,640,000	1239	1.20%	0.30%	30	0.002	0.05%	1.91	0.04%	0.00%	30.37	0.48%	0.15%	0.50%	27,828,788
6	6	KAMPUNG JAWA	565,640,000	2350	2.27%	0.57%	77	0.004	0.14%	2.62	0.05%	0.00%	29.55	0.47%	0.14%	0.85%	47,292,113
7	7	PORANG	565,640,000	1438	1.39%	0.35%	507	0.027	0.93%	2.64	0.05%	0.01%	27.23	0.43%	0.13%	1.41%	78,089,289
8	8	KUTE LINTANG	565,640,000	4985	4.81%	1.20%	171	0.009	0.31%	5.83	0.11%	0.01%	29.11	0.46%	0.14%	1.67%	92,239,042
9	9	LEME	565,640,000	940	0.91%	0.23%	185	0.010	0.34%	11.98	0.23%	0.02%	27.53	0.44%	0.13%	0.72%	39,856,154
10	10	GELE	565,640,000	2135	2.06%	0.51%	266	0.014	0.49%	3.02	0.06%	0.01%	24.88	0.40%	0.12%	1.13%	62,387,137
11	11	SERE	565,640,000	956	0.92%	0.23%	238	0.012	0.44%	13.12	0.25%	0.02%	38.95	0.62%	0.19%	0.88%	48,585,201
12	12	CEMPA	565,640,000	399	0.38%	0.10%	101	0.005	0.18%	1.50	0.03%	0.00%	38.97	0.62%	0.19%	0.47%	26,039,699
13	13	LEMPUH	565,640,000	781	0.75%	0.19%	183	0.010	0.33%	7.03	0.13%	0.01%	41.06	0.65%	0.20%	0.73%	40,589,551
14	14	PALOK	565,640,000	1044	1.01%	0.25%	449	0.023	0.82%	61.34	1.16%	0.12%	29.68	0.47%	0.14%	1.33%	73,769,286
15	15	PENGGALANGAN	565,640,000	1920	1.85%	0.46%	749	0.039	1.37%	30.96	0.59%	0.06%	27.87	0.44%	0.13%	2.03%	112,208,421
16	16	AGUSAN	565,640,000	740	0.71%	0.18%	311	0.016	0.57%	201.77	3.83%	0.38%	34.27	0.55%	0.16%	1.29%	71,703,115
17	17	BUSTANUSSALAM	565,640,000	3119	3.01%	0.75%	107	0.006	0.20%	5.60	0.11%	0.01%	19.26	0.31%	0.09%	1.05%	58,195,756
18	18	PENAMPAAN UKEN	565,640,000	2117	2.04%	0.51%	109	0.006	0.20%	2.62	0.05%	0.00%	29.86	0.48%	0.14%	0.86%	47,505,416
19	19	RAKLUNUNG	565,640,000	1058	1.02%	0.26%	74	0.004	0.14%	4.00	0.08%	0.01%	27.35	0.44%	0.13%	0.53%	29,292,425
20	20	SEPANG	565,640,000	329	0.32%	0.08%	159	0.008	0.29%	5.95	0.11%	0.01%	35.23	0.56%	0.17%	0.55%	30,463,224
<b>II</b>		<b>Kec. Kutapanjang</b>															
21	1	TAMPENG	565,640,000	1134	1.09%	0.27%	91	0.005	0.17%	9.64	0.18%	0.02%	41.28	0.67%	0.20%	0.66%	36,576,496
22	2	BENER	565,640,000	756	0.73%	0.18%	30	0.002	0.05%	145.50	2.76%	0.28%	31.14	0.50%	0.15%	0.66%	36,682,488
23	3	ULUN TANAH	565,640,000	589	0.57%	0.14%	171	0.009	0.31%	8.81	0.17%	0.02%	47.38	0.75%	0.23%	0.70%	38,667,564
24	4	KUTA UJUNG	565,640,000	919	0.89%	0.22%	30	0.002	0.05%	3.81	0.07%	0.01%	45.24	0.72%	0.22%	0.50%	27,689,596
25	5	BERANANG	565,640,000	680	0.66%	0.16%	172	0.009	0.31%	147.72	2.80%	0.28%	44.01	0.70%	0.21%	0.97%	53,702,095
26	6	RIKIT DEKAT	565,640,000	872	0.84%	0.21%	137	0.007	0.25%	14.72	0.28%	0.03%	38.17	0.61%	0.18%	0.67%	37,185,555
27	7	REMA	565,640,000	1063	1.03%	0.26%	176	0.009	0.32%	6.00	0.11%	0.01%	40.71	0.65%	0.19%	0.78%	43,445,513
28	8	REMA BARU	565,640,000	622	0.60%	0.15%	207	0.011	0.38%	32.53	0.62%	0.06%	44.70	0.71%	0.21%	0.80%	44,543,626
29	9	CIKE	565,640,000	317	0.31%	0.08%	133	0.007	0.24%	1.52	0.03%	0.00%	40.24	0.64%	0.19%	0.51%	28,526,866
30	10	KERUKUNAN KUTA PJG.	565,640,000	1524	1.47%	0.37%	15	0.001	0.03%	2.05	0.04%	0.00%	25.40	0.40%	0.12%	0.52%	28,813,670
31	11	TAMPENG MUSARA	565,640,000	480	0.46%	0.12%	59	0.003	0.11%	6.17	0.12%	0.01%	52.14	0.83%	0.25%	0.48%	26,838,580
32	12	KONG PALUH	565,640,000	284	0.27%	0.07%	25	0.001	0.05%	3.57	0.07%	0.01%	38.97	0.62%	0.19%	0.31%	17,015,738
<b>III</b>		<b>Kec. Rikit Gaib</b>															

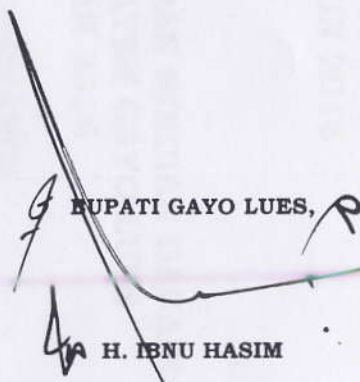




Nomor	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Alokasi Berdasarkan Formula	Pag	
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot			
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) + (9) + (12) + (15)	(17)					
Urut	Per Kec	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
<b>X</b>		<b>Kec. Tripe Jaya</b>																
118	1	PERLAK	565,640,000	1178	1.14%	0.28%	106	0.006	0.19%	97.64	1.85%	0.19%	65.63	1.05%	0.31%	0.98%	54,117,704	
119	2	REREBE	565,640,000	1263	1.22%	0.30%	175	0.009	0.32%	50.01	0.95%	0.09%	58.65	0.93%	0.28%	1.00%	55,391,217	
120	3	PASIR	565,640,000	1183	1.14%	0.29%	324	0.017	0.59%	74.78	1.42%	0.14%	55.20	0.88%	0.26%	1.28%	71,120,080	
121	4	SETUL	565,640,000	226	0.22%	0.05%	111	0.006	0.20%	33.34	0.63%	0.06%	62.17	0.99%	0.30%	0.62%	34,229,146	
122	5	UPT PAYA KUMER	565,640,000	459	0.44%	0.11%	98	0.005	0.18%	14.76	0.28%	0.03%	65.69	1.05%	0.31%	0.63%	35,001,312	
123	6	UPT PANTAN KELA	565,640,000	317	0.31%	0.08%	8	0.000	0.01%	6.19	0.12%	0.01%	62.78	1.00%	0.30%	0.40%	22,310,838	
124	7	BUNTUL MUSARA	565,640,000	496	0.48%	0.12%	170	0.009	0.31%	86.21	1.64%	0.16%	35.53	0.57%	0.17%	0.76%	42,328,127	
125	8	KUALA JERNIH	565,640,000	455	0.44%	0.11%	8	0.000	0.01%	84.30	1.60%	0.16%	63.70	1.01%	0.30%	0.59%	32,613,180	
126	9	UYEM BERIRING	565,640,000	483	0.47%	0.12%	142	0.007	0.26%	42.86	0.81%	0.08%	56.51	0.90%	0.27%	0.73%	40,309,696	
127	10	PULO GELIME	565,640,000	243	0.23%	0.06%	35	0.002	0.06%	138.12	2.62%	0.26%	63.96	1.02%	0.31%	0.69%	38,247,681	
<b>XI</b>		<b>Kec. Pantan Cuaca</b>																
128	1	SENERAN	565,640,000	406	0.39%	0.10%	181	0.009	0.33%	16.67	0.32%	0.03%	42.47	0.68%	0.20%	0.66%	36,765,329	
129	2	REMKUT	565,640,000	808	0.78%	0.19%	289	0.015	0.53%	50.37	0.96%	0.10%	50.39	0.80%	0.24%	1.06%	58,722,725	
130	3	KENYARAN	565,640,000	784	0.76%	0.19%	188	0.010	0.34%	23.86	0.45%	0.05%	35.59	0.57%	0.17%	0.75%	41,457,513	
131	4	TETINGGI	565,640,000	568	0.55%	0.14%	179	0.009	0.33%	17.67	0.34%	0.03%	43.08	0.69%	0.21%	0.70%	38,992,850	
132	5	ATU KAPUR	565,640,000	1149	1.11%	0.28%	130	0.007	0.24%	4.76	0.09%	0.01%	32.53	0.52%	0.16%	0.68%	37,635,797	
133	6	SURI MUSARA	565,640,000	584	0.56%	0.14%	91	0.005	0.17%	23.81	0.45%	0.05%	33.88	0.54%	0.16%	0.51%	28,496,556	
134	7	UPT AIH SELAH	565,640,000	308	0.30%	0.07%	95	0.005	0.17%	20.65	0.39%	0.04%	47.09	0.75%	0.22%	0.51%	28,378,257	
135	8	CANE BARU	565,640,000	638	0.62%	0.15%	84	0.004	0.15%	21.43	0.41%	0.04%	47.83	0.76%	0.23%	0.58%	31,950,104	
136	9	KUNING KURNIA	565,640,000	213	0.21%	0.05%	99	0.005	0.18%	1.91	0.04%	0.00%	38.94	0.62%	0.19%	0.42%	23,386,827	
<b>Total</b>			<b>76,927,040,000</b>	<b>103,681</b>	<b>100%</b>	<b>25%</b>	<b>19,126</b>	<b>100%</b>	<b>35%</b>	<b>5,267</b>	<b>100%</b>	<b>10%</b>	<b>6,279.97</b>	<b>100%</b>	<b>30%</b>	<b>100%</b>	<b>5,539,675,000</b>	

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kabupaten X	82,466,715,000 (c)
sil Perhitungan Pagu Dana Desa Kabupa	82,466,715,000 (d)
Pagu Alokasi Dasar	565,640,000 (e)
Total Pagu Alokasi Dasar	76,927,040,000 (f)
Pagu Alokasi Formula	5,539,675,000 (g)
Total Pagu Alokasi Formula	5,539,675,000 (h)
Jumlah Desa	136 (i)

Bobot	
JP	25% (j)
AK	35% (k)
LW	10% (l)
IKG	30% (m)

  
**H. IBNU HASIM**  
 BUPATI GAYO LUES,